

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan sebagai salah satu peran strategis pertanian merupakan tugas yang tidak ringan, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar yaitu 237,6 juta jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,25 persen per tahun dan tingkat konsumsi beras 102,2 kg/kapita/tahun (Kementerian Pertanian, 2010).

Tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar berada di pedesaan dan memiliki kultur budaya kerja keras merupakan potensi tenaga kerja diberbagai bidang, termasuk bidang peternakan. Apabila keberadaan penduduk yang besar di suatu wilayah dapat ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk dapat bekerja dan berusaha di sektor produksi, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, maka dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi hasil peternakan bagi pemenuhan kebutuhan pasar nasional dan dunia. Peningkatan kapasitas penduduk dalam hal pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang peternakan dapat juga dilakukan melalui penempatan tenaga kerja peternakan terlatih di daerah yang masih kurang penduduknya dan penyediaan fasilitas peternakan dalam bentuk faktor produksi, bimbingan teknologi serta pemberian jaminan pasar yang baik (Kementerian Pertanian, 2010).

Kondisi tersebut di atas sesuai dengan tujuan Kementerian Pertanian yang menempatkan beras, jagung, kedelai, daging sapi dan gula sebagai lima komoditas pangan utama. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan utama tersebut, target Kementerian Pertanian selama 2010-2014 adalah pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Pencapaian swasembada ditujukan untuk kedelai, daging sapi dan gula dengan target sasaran produksi adalah kedelai 2,70 juta ton, daging sapi 0,55 juta ton, dan gula 5,7 juta ton pada tahun 2014.

Kondisi di atas berbanding terbalik dengan kondisi organisasi peternakan yang saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usaha ternak. Di sisi lain, kelembagaan usaha yang ada di pedesaan, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan kelompok peternak sebagai wadah pembinaan teknis. Akibatnya, peternak belum mampu membuahkan hasil

peternakan yang memuaskan. Padahal dewasa ini, permintaan konsumsi daging dan produk-produk peternakan dalam negeri semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan dan daya beli serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan gizi. Padahal dengan meningkatnya permintaan tersebut, memberikan peluang untuk berkembangnya usaha agribisnis peternakan. Usaha agribisnis peternakan berbasis sumberdaya lokal mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan karena berbagai sarana pendukung seperti agroinput, teknologi, kelembagaan dan tenaga kerja tersedia di seluruh wilayah propinsi.

Dalam rangka peningkatan produksi daging sapi di Propinsi Sumatera Barat beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan diantaranya pengembangan usaha pembiakan dan penggemukan sapi lokal yang terdiri dari; a) Penguatan modal usaha kelompok peternak melalui pemberian kredit lunak jangka panjang atau modal abadi dalam bentuk bantuan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada kelompok peternak yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu; b) Pengembangan Program Sarjana Membangun Desa (SMD) dan pengembangan sistem manajemen regional melalui Sarjana Membangun Desa dengan cara; (1) Bantuan kredit lunak jangka panjang atau penyediaan modal abadi dalam bentuk bantuan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada SMD dan kelompok peternak terpilih; (2) Pemberian bantuan dana bagi sarjana pengelola kelompok peternak untuk mengembangkan manajemen dan organisasi usaha kelompok dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan jejaring usaha pembiakan dan/atau penggemukan serta pemasaran.

Kegiatan Sarjana Membangun Desa merupakan salah satu kegiatan utama Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian yang mendukung Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDS/K) tahun 2014 dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak berbasis sumberdaya domestik. Kegiatan ini secara nasional mulai dilaksanakan sejak tahun 2007 dengan fokus pada pengembangan usaha sapi potong, dengan 10 (sepuluh) kelompok. Pada tahun 2009 kegiatan SMD diperluas pada komoditi ternak unggas lokal, sapi perah, kambing atau domba dan kelinci, dimana keempat komoditi ini tidak hanya dapat meningkatkan usaha ekonomi di pedesaan, tetapi juga berperan mendukung program restrukturisasi perunggasan dan memperkuat program diversifikasi pangan.

Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) dalam upaya pemberdayaan kelompok tani ternak yang dilakukan dengan menempatkan tenaga Sarjana Peternakan dan Kedokteran Hewan

maupun D-3 Ilmu-ilmu Peternakan dan Kedokteran Hewan melalui pendampingan kelompok sekaligus penyaluran dana penguatan modal usaha di kelompok tani. Dengan penempatan SMD di pedesaan diharapkan dapat melakukan transfer teknologi dari Perguruan Tinggi ke masyarakat dan meningkatkan jiwa kewirausahaan pada kelompok yang didampingi. Program Sarjana Membangun Desa itu sendiri bertujuan untuk; a) Memperkuat modal usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha peternakan; b) Meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan peternak; c) Meningkatkan kemandirian dan kerjasama kelompok; d) Mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku agribisnis muda dan terdidik pada usaha peternakan; dan e) Mengembangkan sentra-sentra kawasan usaha peternakan.

Di Sumatera Barat, kegiatan SMD ini sudah dimulai tahun 2007 dengan 3 orang SMD yaitu di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok dan Kabupaten Padang Pariaman. Tahun 2008 dengan 29 orang SMD, tahun 2009 dengan 66 orang SMD, tahun 2010 dengan 100 orang SMD, dan tahun 2011 dengan 100 orang SMD. Jumlah seluruh SMD tahun 2007 – 2011 adalah 298 orang SMD yang tersebar di Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota yang terbanyak memiliki SMD adalah Kabupaten Tanah Datar dengan 54 orang SMD, diikuti dengan Kabupaten Pesisir Selatan 41 SMD dan Kabupaten 50 Kota 39 SMD.

Kebijakan kegiatan SMD tahun 2009 dari pengembangan komoditi sapi potong ke kerbau, sapi perah, kambing atau domba, unggas lokal dan aneka ternak lainnya, maka di Sumatera Barat sudah tersebar komoditi sapi potong sebanyak 200 SMD, kerbau sebanyak 1 SMD, sapi perah sebanyak 2 SMD, kambing sebanyak 45 SMD, unggas sebanyak 49 SMD dan aneka ternak 1 SMD, seperti pada Lampiran II.

Pada hakikatnya, keberhasilan sebuah program, termasuk program SMD untuk peternak, dipengaruhi oleh partisipasi dari peternak itu sendiri, mekanisme pelaksanaan program serta proses pendampingan dalam menerapkan pendekatan partisipasi. Tingkat partisipasi peternak dipengaruhi oleh tingkat kewenangan atau kekuasaan untuk mengontrol atau menentukan pengambilan keputusan dalam berbagai tahap kegiatan tersebut untuk meyakinkan bahwa kepentingannya dapat dipenuhi (Panudju, 1999).

Pelaksanaan SMD diharapkan menjadi salah satu program pembangunan partisipatif yang dapat berkontribusi bagi peningkatan hasil ternak dan peningkatan kemandirian peternak di Sumatera Barat. Jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam Program SMD ini berupa pemilihan bibit, pakan, dan lain sebagainya. Pelaksanaan kegiatan ini menerapkan pendekatan pemberdayaan

peternak dengan cara melibatkan peternak dan meningkatkan kemampuan peternak dalam proses pelaksanaannya. Tingkat keterlibatan peternak dalam proses pelaksanaan program SMD di Sumatera Barat dinilai cukup tinggi dan *output* yang telah dapat dirasakan manfaatnya oleh peternak itu sendiri, namun kemandirian peternak dalam mengelola ternak belum terwujud, peternak masih sangat berharap pada bantuan SMD dan pihak terkait. Sehubungan dengan hal ini, maka untuk dapat mengetahui efektivitas pelaksanaan program SMD di Sumatera Barat perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Begaimanakah tingkat efektivitas pelaksanaan program SMD di Sumatera Barat dalam meningkatkan kesejahteraan peternak sapi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan program SMD di Sumatera Barat dalam meningkatkan kesejahteraan peternak sapi.

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi bahan referensi atau rujukan kepada pemerintah daerah atau pihak terkait dalam rangka mengetahui efektifitas keberhasilan pelaksanaan SMD di Sumatera Barat dalam meningkatkan kesejahteraan peternak sapi.
2. Memberikan rekomendasi kepada *stakeholders* yang berkepentingan dalam bidang peternakan dan SMD untuk masa mendatang di Sumatera Barat.